

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Perekayasaan Kerangka Konseptual Akuntansi dalam Pandangan Islam

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Faiz, Ihda A
Publisher	STAIN Kudus
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-06 23:10:23
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/155441

PEREKAYASAAN KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI DALAM PANDANGAN ISLAM

Ihda A Faiz

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Hamfara Yogyakarta, Indonesia

aafai45@yahoo.co.id

Abstrak

Pendekatan dikotomis terhadap pengembangan akuntansi syariah yang saat ini ada (filosofis dan praktis) lebih rendah direpson masyarakat daripada prospek pengembangan di masa depan. Perlu pola pendekatan sinergis antara keduanya diwujudkan dalam rangka menciptakan harmoni dan kegunaan nyata di masyarakat dan keberlanjutan pengembangan ilmu itu. Tulisan ini bertujuan untuk membangun tinjauan kritis kerangka konseptual proses perekayasa akuntansi yang ada sejak dahulu yang menjadi jembatan antara aspek praktis dan teoritis. Perekayasa akuntansi dimulai dari penentuan tujuan ekonomi dan sosial suatu negara atas prinsip tertentu. Akuntansi konvensional membangun tujuan ini pada prinsip individualisme, sedangkan dalam Islam tujuan ekonomi harus bergantung pada maqasid asy-syar'iyah dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial. Derivasi dari prinsip ini adalah pembentukan asumsi dan tujuan pelaporan keuangan. Akuntansi konvensional didasarkan pada konsepsi entitas ekonomi. Sementara pandangan Islam, bisnis perusahaan (syirkah) adalah objek kepribadian hukum yang harus tunduk pada aturan yang berlaku dan tanggung jawab dalam pelaksanaan syariat terkait.

Keywords: Kerangka Konseptual, Akuntansi Syari'ah, Entitas Ekonomi

Abstract

THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF ACCOUNTING IN ISLAMIC VIEWS. Dichotomous approach to the development of Islamic accounting that current existed (philosophical and practical) results in lower public response on this idea and the prospect of development in the future. It should be realized pattern of a synergistic approach between both of them in order to create harmony and real usefulness in the community and the development of sustainability. This study aims to construct critical review the conceptual framework of accounting engineering process of existing since the engineering world is a bridge between practical and theoretical aspects. Accounting engineering starts from the determination of economic and social objectives of a country over a certain principle. Conventional accounting construct this purpose on the principle of individualism, whether in Islamic this objective should be the determination relies on maqasid asy syar'iyah in order to create rahmat lil 'alamin function. Derivations of this principle is the establishment the assumptions and financial reporting purposes. Conventional accounting based on the conception of economic entity. Meanwhile, based on Islamic views, the company business (shirkah) is a legal object Personality 'which must be subject to the rules that apply Shari'a-related forms and responsibility in the implementation.

Keyword: Conceptual framework, Syari'ah Accounting, Economic entity

A. Pendahuluan

Dalam praktek penggunaan akuntansi di Indonesia yang berkembang sejak tahun 1990-an, Triyuwono membagi akuntansi syari'ah menjadi dua bentuk yaitu akuntansi syari'ah praktis dan akuntansi syari'ah *filosofis-teoritis*.¹ Akuntansi syari'ah praktis lebih menitikberatkan pada kebutuhan praktis penyedia dan pengguna laporan keuangan akuntansi syari'ah yang terkesan sekedar melakukan modifikasi sederhana atas akuntansi modern (konvensional) yang saat ini berkembang. Sedang akuntansi syari'ah *filosofis-teoritis* lebih mengacu pada bentuk ideal dengan

¹ Iwan Triyuwono. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 27.

cara menggali dan menggunakan nilai-nilai filosofi Islam yang akan berbeda antara keduanya adalah bahwa akuntansi syari'ah praktis hanya dipraktekkan pada lembaga keuangan syari'ah saja. Sedangkan akuntansi digunakan sebagai landasan dalam membangun teori akuntansi syari'ah, lebih jauh akuntansi syari'ah *filosofis-teoritis* dibangun untuk semua institusi bisnis.

Ada pula yang menggunakan pendekatan alternatif, yaitu melihat akuntansi dari kacamata diluar pola pikir yang selama ini berkembang dengan konsep *hiperstrukturalisme Islam integratif* yang dikembangkan oleh Mulawarman.² Beliau menyebutkan sebagai bentuk rekonstruksi yang telah melakukan integralisasi konsep strukturalisme dan *post strukturalisme* sekaligus melampauinya (*hyper*). Intinya adalah mencoba melihat dari luar sistem yang selama ini berkembang (metode *positivistik*) sehingga bisa didapatkan pengertian lain diluar kebiasaan, baik melalui penakwilan, penambahan, atau modifikasi.

Metode ini memiliki keunggulan dari sisi komponen berpikir yang memasukkan unsur intelektual, mental dan spiritual dalam analisisnya yang tidak akan didapati dalam *metodologi positivistic* karena dalam pandangan mereka pemikiran tidak lagi rasional jika telah memasukkan unsur-unsur *immateri*. Fungsinya adalah menghasilkan produk baru dari metodologi alternatif sehingga diharapkan akan menghasilkan derivasi pemikiran yang beragam, berbeda dari yang biasanya. Triyuwono menyinggung hal tersebut tidak dapat langsung dipraktekkan mengingat *Shari'ate Value Added Statement (SVAS)*, yang merupakan salah satu hasil dari metodologi *hiperstrukturalisme Islam integratif*, adalah salah satu bagian dari Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah sehingga tidak mungkin mempraktekkan satu bagian saja dari laporan keuangan yang utuh.³ Masih banyak lagi yang bisa kita eksplorasi dari gagasan yang beliau lontarkan baik yang bisa kita ambil ataupun dapat kita kritisi.

² Aji Dedi Mulawarman. *Menyibak Akuntansi Syariah : Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta, 2006).

³ Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi* ..., hlm. 31.

Tetapi disisi lain, tampak terlihat disiplin ilmu akuntansi syari'ah tidak begitu menarik perhatian banyak kalangan yang bergelut di bidang akuntansi secara umum (akuntansi konvensional). Jikalau perkembangan akuntansi syari'ah terlihat semarak akhir-akhir ini, menurut penulis disebabkan karena tuntutan perkembangan laju perbankan syari'ah yang tumbuh semakin pesat sehingga banyak praktisi merasa membutuhkan piranti yang seirama dengan perjuangan mereka yaitu akuntansi yang dapat mengakomodir perkembangan sektor keuangan syari'ah. Cepatnya laju pertumbuhan perbankan syari'ah dan sektor keuangan syari'ah yang lain mendesak para praktisi untuk membuat seperangkat sistem akuntansi yang bernafaskan Islam, paling tidak secara *dharuri* (mendesak) dalam bentuk modifikasi akuntansi yang selama ini berkembang. Beragam cara ditempuh, mulai dari penggantian istilah menjadi istilah yang Islami (berbahasa arab), memasukkan ranah spiritual dalam praktek pelaksanaan akuntansi konvensional, atau bahkan ada pula yang tetap memakai konsep akuntansi konvensional apa adanya.

Bagi akademisi terutama, tentu mereka mendapat 'tantangan' dan 'tuntutan' yang datang dari dunia praktisi perihal kebutuhan mereka akan konsepsi serta aspek teknis akuntansi syari'ah. Di dunia akademisi pun terjadi perbedaan dalam menyikapi laju perkembangan dunia keuangan syari'ah yang terjadi di lapangan. Cara menjawabnya pun beragam, ada yang tetap memakai konsep serta teknis akuntansi umum, ada yang mengubah paradigmanya tetapi tetap mempertahankan aspek teknisnya dan ada pula yang berkeinginan merombak total konsepsi/ paradigma serta teknis yang selama ini berkembang. Begitulah kenyataannya yang terjadi di lapangan.

Tetapi perkembangan di dunia akademisi dalam hal membangun kerangka akuntansi syari'ah tidak begitu menggembirakan sebagaimana derasnya tuntutan kaum praktisi untuk memenuhi hajat hidup laju pertumbuhan lembaga keuangan syari'ah yang mereka perjuangkan. Terlebih lembaga keuangan syari'ah kini pun semakin tumbuh beraneka ragam,

tidak hanya sektor perbankan semata tetapi mencakup asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, pasar modal syari'ah, dan unit usaha lain yang bernuansa syari'ah.

Melihat perkembangan semacam ini, tentu tidak berimbang antara laju kebutuhan dan tingkat pemenuhan. Seolah terjadi *slack* antara kebutuhan di lapangan dengan pemenuhannya oleh kalangan akademisi. Maka tak heran, produk yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (dibawah MUI) yang berwenang mengeluarkan standar akuntansi syari'ah terkesan setengah matang dan tergesa-gesa. Oleh karenanya butuh keseriusan dan partisipasi aktif dari segenap komponen masyarakat dan civitas akademika bidang akuntansi (terutama kaum muslim) untuk ikut memberikan andil dalam membuat rancang bangun akuntansi yang berstandarkan syari'ah.

Hal senada juga diungkapkan oleh Muhammad tentang tuntutan keberadaan akuntansi syari'ah yang dimotori oleh laju perkembangan perbankan syari'ah yang lebih dahulu populer. Muhammad mengakui bahwa para pakar syari'ah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank konvensional seperti telah dikenal selama ini. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bank syari'ah dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga seperti lazimnya harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun dalam konteks syari'ah Islam.⁴

Banyak motivasi atau alasan yang melatarbelakangi penulisan yang *intens* tentang akuntansi syari'ah oleh beberapa kalangan. Mulai dari yang bersifat penggunaan praktis hingga taraf dorongan ideologis. Oleh karenanya pembahasan mengenai kerangka berpikir menjadi mutlak diperlukan untuk dikaji. Jembatan penghubung antara pengalaman dunia praktis dengan dunia akademis adalah adanya teori yang mendasarinya. Selama ini kritikan yang ada tidak mengupas bentuk kajian seperti ini

⁴Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005). hlm. 43.

secara sistematis sehingga berimbas pada miskonsepsi. Inilah ruang lingkup menyeluruh ulasan studi ini sehingga diharapkan tidak ada permasalahan tercecer karena perbedaan landasan berpikir.

B. Pembahasan

1. Teori Akuntansi

Pada awalnya, akuntansi merupakan disiplin teknik pencatatan (pembukuan) keuangan yang aplikatif sehingga tidak akan ada orang yang bisa menguasainya tanpa terlebih dahulu terjun langsung dalam dunia praktek dan mengerjakan magang (*apprenticeship*) pada pihak praktisi yang lebih dulu mengenal dan mengembangkan akuntansi. Tidak heran banyak kalangan yang menganggap akuntansi adalah seni atau kerajinan (*art*). Penyebutan akuntansi sebagai *art* tidak lain karena belum dirumuskannya secara jelas metode dasar dan pola operasionalnya sehingga pada praktiknya lebih banyak menggunakan pertimbangan estetika dan pertimbangan nilai (*value judgment*). Proses ini menuntut keahlian dan pengalaman dari akuntan untuk memilih perlakuan yang terbaik.⁵

Perkembangan pengetahuan dan keterampilan inipun semakin kompleks dengan dinamisnya perjalanan dunia bisnis secara umum. Perkembangan akuntansi mengiringi ‘metabolisme’ dunia usaha. Semakin cepat dan rumitnya perkembangan dunia bisnis maka kebutuhan akan akuntansi yang kompleks dan *compatibel* pun tidak dapat dihindari. Dalam perkembangan selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan akuntansi dapat diidentifikasi dengan jelas sehingga membentuk seperangkat pengetahuan utuh yang dapat diajarkan melalui institusi pendidikan. Dari sinilah perkembangan akuntansi mengalami kemajuan yang luar biasa. Riset dan pengembangan semakin gencar dilakukan oleh dunia akademisi dengan dukungan dunia praktisi yang mengiringi dinamisasi ritme dunia bisnis.

⁵ Suwardjono, *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan* (Yogyakarta: BPFE, 2005), hlm. 11.

Tidak ada masalah di dunia praktisi tentang peran penting akuntansi. Mereka hanya dituntut secara praktis untuk dapat mengikuti ritme perjalanan bisnis yang dihadapi dengan mengembangkan sistem akuntansi yang dimiliki. Justru perdebatan terjadi di dunia akademisi tentang bagaimana merefleksikan akuntansi ke dalam dunia pembelajaran. Akuntansi dianggap sebagai ilmu murnikah seperti halnya fisika, matematika, kedokteran, dan lain-lain, ataukah tetap dalam keadaannya sebagai *skill* (keterampilan)?

Perbedaan pendapat tersebut tampak jelas dalam metodologi pengembangan teori akuntansi yang ditawarkan masing-masing pihak. Perbedaan pendekatan ini memiliki konsekuensi yang berlainan terhadap proses dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selama perdebatan ini belum selesai dituntaskan, maka perjalanan pembelajaran akuntansi akan selalu mengalami konflik dan perselisihan. Kesemua itu berimbas pada proses dan tujuan pembelajaran yang pada akhirnya akan mempengaruhi output yang dihasilkan. Permasalahan ini juga berimplikasi pada kebingungan perkembangan wacana akuntansi syari'ah selama ini.

Dalam tataran akademis, para pakar kemudian berbeda pendapat bagaimana upaya teoritisasi akuntansi yang tepat. Perbedaan pendapat ini bermula dari perbedaan kategorisasi akuntansi itu sendiri, apakah masuk dalam ranah seni, sains, atau teknologi. Jika dimasukkan dalam kategori sains maka akuntansi mampu menjelaskan dan memprediksi kejadian yang berkembang di lapangan selama ini. Tentu saja teori akuntansi tidak mampu memenuhi aspek kedua yakni prediksi. Namun bila digolongkan sebagai teknologi (dalam bentuk penalaran logis) maka teori akuntansi digunakan untuk menjelaskan praktek-praktek yang ada guna memperoleh pemahaman yang lebih baik atasnya.

Hal ini karena karakter utama yang melekat dalam setiap teknologi adalah kebermanfaatannya. Dengan asas ini, akuntansi akan lebih mudah untuk berinteraksi (memanfaatkan) teori-teori dari disiplin ilmu yang sudah *stable*. Disamping itu, akuntansi juga

bisa memanfaatkan teknik-teknik, model-model dan metode-metode yang telah dulu dikembangkan oleh ilmu lain.⁶ Inilah keleluasaan yang dimiliki oleh akuntansi apabila dikategorikan sebagai teknologi. Tidak demikian apabila akuntansi masuk dalam kategori ilmu ataupun seni.

Selain bermanfaat, teknologi juga harus disesuaikan dengan tujuan sosial serta sistem nilai yang hidup dalam lingkungan masyarakat tersebut. Produk dari teknologi inilah yang nantinya dinikmati langsung oleh masyarakat. Seperti halnya teknologi fisis lainnya, produk teknologi lunak juga senantiasa mengikuti ritme kebutuhan dan dinamitas *user* (pengguna). Proses dalam menentukan cara terbaik untuk mendapatkan produk (hasil) terbaik dalam penerapan suatu teknologi disebut dengan perekayasaan (*engineering*). Di sinilah teknologi mulai berkembang.

Manfaat teknologi dapat dirasakan tergantung pada siapa penggunaannya serta untuk tujuan apa keberadaan teknologi itu. Manfaat tersebut tentu berbeda apabila dinikmati oleh satu entitas usaha (perusahaan) dibandingkan dengan apabila dimanfaatkan oleh suatu masyarakat dalam sebuah negara. Meski tidak dilegislasikan secara sah oleh pemerintah mengenai standar akuntansi yang berterima di suatu negara, menentukan karakter bersama (*characteristics in common*) merupakan keniscayaan sebagai syarat keterbandingan laporan keuangan. Sebagai alternatifnya adalah dengan berdirinya institusi independen yang mewakili profesi untuk menyusun standar penyajian informasi keuangan. Di tingkat nasional inilah produk perekayasaan akuntansi disebut sebagai kerangka konseptual (*conceptual framework*) yang berfungsi:

- a. Acuan pengevaluasian praktek akuntansi yang berjalan.
- b. Pengaruh pengembangan praktek dan prosedur akuntansi baru.
- c. Basis penurunan standar akuntansi.

⁶ Bambang Sudibyo. "Rekayasa Akuntansi dan Permasalahannya di Indonesia". Makalah disampaikan dalam acara peringatan ulang tahun Ikatan Akuntansi Indonesia ke 29 Jakarta, 22 Desember 1986.

- d. Titik tolak pengujian dan perbaikan praktek berjalan.
- e. Pedoman pemecahan masalah potensial.

Perekayasaan akuntansi inilah yang menjadi jembatan penghubung antara dunia praktis dan ranah teoritis. Disinilah “demarkasi” penting untuk memahami secara utuh bangunan akuntansi itu sendiri. Maksud akuntansi di sini adalah dalam pengertian yang lebih luas yaitu sebagai suatu sistem pelaporan keuangan umum yang melibatkan kebijakan umum akuntansi (tentang struktur, mekanisme, pihak yang terlibat, dan standar pelaporan) dalam suatu wilayah negara tertentu.⁷ Pengertian akuntansi dalam arti luas ini dirasa lebih adil dan mencakup semua komponen yang terkait dengan pembahasan akuntansi itu sendiri. Hal ini berfungsi untuk menjaga miss-komunikasi pengertian akuntansi dari masing-masing pihak.

Dari uraian di atas didapatkan pemahaman bahwa sejatinya akuntansi merupakan bentuk teknologi yang bebas guna sesuai kebutuhan dan kebermanfaatannya bagi *user*. Muatan nilai atasnya pada hakikatnya merupakan nilai bentukan dari luar, bukan nilai *inheren* yang dihasilkan oleh akuntansi itu sendiri. Oleh karenanya istilah akuntansi konvensional (umum) dan akuntansi syaria’ah seharusnya tidak perlu ada karena aspek kebermanfaatannya (sebagai teknologi) tergantung pada penggunaannya, bukan muatan ideologi yang disebarkannya.

Pada faktanya, labelisasi semacam ini tidak dapat dihindari karena nilai (ideologi) Islam sangat bertentangan dengan nilai kapitalisme. Pengguna dan lingkungannya juga berbeda, yaitu antara Islam dan kapitalisme. Sebab ideologi kapitalisme saat ini mendominasi dan menghegemoni dunia sehingga tak pelak simplifikasi akuntansi konvensional adalah produk atau anak kandung kapitalisme semakin tak bisa dihindari. Fakta semacam ini pada dasarnya telah disadari oleh banyak kalangan, seperti Baswir (1996) menyatakan bahwa:

⁷ Suwardjono. *Teori Akuntansi ...*, hlm. 18.

“...munculnya kesan bahwa akuntansi juga memiliki kaitan dengan ideologi sulit untuk dielakkan, dan akuntansi seperti yang saat ini diajarkan pada jurusan-jurusan akuntansi di Indonesia ternyata sangat kuat dipengaruhi oleh kapitalisme. Pengaruh kapitalisme itu terutama tampak sangat nyata pada kuatnya pengaruh prinsip ekonomi kapitalistik dalam penyajian laporan keuangan pendapatannya”.⁸

Namun kondisi ini tidak bisa menjadi alasan untuk mengeluarkannya dari kategorian teknologi dengan sifatnya bergantung pada siapa yang memanfaatkan (*aksiologi*). Maka karenanya, tidak perlu ada upaya berlebihan untuk mendekonstruksi akuntansi konvensional dan mengkonstruksi akuntansi syari’ah dalam bentuk simbolisasi yang khas. Seperti yang dilakukan oleh Mulawarman dengan mencoba menyusun simbol akuntansi syari’ah yang berbeda simbol akuntansi konvensional. Muncullah istilah Neraca Syari’ah, Laporan Arus Kas Syari’ah, Laporan Keuangan Syari’ah, dan Laporan Nilai Tambah Syari’ah. Menurut Mulawarman, Laporan Nilai Tambah Syari’ah berbasis rizki merupakan salah satu bentuk derivasi dari konsep Islam tentang aspek *ma’isyah rizq maal*.

Berdasarkan uraian di atas kiranya cukup untuk mendudukan *positioning* akuntansi diantara ideologi yang ada di dunia. Pertanyaannya sebetulnya sederhana, apabila kita mengamati fakta yang sama tetapi menghasilkan penafsiran serta aktualisasi yang berbeda maka yang salah apanya? Atau, apa sebab perbedaan pemahaman atas fakta tersebut? Fakta yang diindera ataukah *mindset* masing-masing orang? Bila hasil pengamatannya menunjukkan hasil yang seragam antar orang, maka ia bersifat universal dan terkategori ilmu. Namun bila hasil pengamatan menunjukkan perbedaan, maka permasalahannya terletak pada *mindset* (An-Nabhani menyebutnya sebagai informasi awal / *ma’lumat tsabiqah*) orang yang mengamati obyek tersebut. *Mindset* inilah yang seharusnya kita ubah. Bisa juga jika persepsi masing-

⁸ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005a), hlm. 2-3.

masing orang sama, kekeliruan terjadi pada tataran kelemahan indera atau alat bantu yang digunakan.

Karena pertimbangan penerimaan masyarakat, maka penulis masih menggunakan terminologi akuntansi syari'ah dan akuntansi konvensional. Namun istilah ini bermakna akuntansi yang digunakan dalam nilai dan lingkungan syari'ah Islam serta akuntansi yang dipraktekkan dalam lingkungan konvensional (kapitalistik). Bukan akuntansi yang berasal dari Islam ataupun kapitalis (konvensional)

2. Rekontruksi Akuntansi Bernilai Islam

Cara tercepat dan paling mudah dalam merekonstruksi akuntansi agar bernilai Islam adalah dengan meletakkan akuntansi pada lingkungan baru yang membentuknya dan mengisinya dengan nilai atau ideologi Islam. Hal ini merujuk pada upaya merumuskan kerangka konseptual sebagai wadah bagi akuntansi agar memuat nilai Islam. Setelah itu, baru dapat dievaluasi sejauh mana penggunaan prinsip akuntansi sejalan dengan bangunan *conceptual framework* yang telah diislamkan. Tataran konseptual justru merupakan tahap paling riskan terhadap persoalan nilai atau ideologi yang dibawa. Ini karena, banyak asumsi atau penilaian dasar dalam *conceptual framework* bersifat bawaan (*given*) yang bermuatan ideologi tertentu. Suwardjono merumuskan proses perekayasaan pelaporan akuntansi sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut.⁹

Paling tidak melalui proses rumusan perekayasaan akuntansi inilah kita evaluasi rancang bangun awal akuntansi Islam. Metode yang lebih tepat untuk mengembangkan disiplin baru ini adalah penalaran deduktif normatif sebagaimana dikembangkan oleh Hendriksen,¹⁰ karena sebagian besar penggagas akuntansi syari'ah memulainya dari konsepsi paradigma atau filosofi yang berbeda antara akuntansi syari'ah dan akuntansi konvensional. Pertimbangan lain untuk memakai konsepsi kerangka konseptual

⁹ Suwardjono. *Teori Akuntansi ...*, hlm. 102.

¹⁰ Eldon S. Hendriksen. *Teori Akuntansi (Terjemahan)*. (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 54.

sebagai *judgment* adalah besarnya manfaat penggunaan kerangka konseptual sebagaimana yang diungkap oleh Kam.

Proses pererkayaan keuangan model Suwardjono di atas mampu memberikan definisi akuntansi yang *jami'* (mencakup semua) dan *mani'* (definitif). Hal ini ditunjang definisi akuntansi Suwardjono¹¹ dirasa paling tepat menggambarkan fakta akuntansi untuk saat ini. Karenanya penulis menggunakan konsepsi di atas sebagai pijakan pembahasan. Konseptualisasi kerangka konseptual itu sendiri di tataran praktis terdapat perbedaan antar institusi, semisal *Financial Accounting Standards Board* (FASB), *International Accounting Standards Committee* (IASC) atau antar pakar akuntansi.

Tujuan Pelaporan Keuangan harus didasarkan pada tujuan negara atau masyarakat secara luas. Dalam koridor Islam, tujuan negara menurut Islamlah yang menjadi rujukan. Bila kapitalisme memandang hak asasi paling utama yang harus dijunjung tinggi oleh negara adalah hak individu (*individualisme*), maka dalam Islam seluruh perbuatan manusia harus tunduk dalam aturan perintah Allah SWT dalam syari'at Islam. Tak heran individu dalam pandangan Barat mendapat tempat yang paling tinggi sehingga berkesempatan untuk mengeksploitasi kekayaan dunia sesuai kehendak pribadi, tak dibatasi. Dari sinilah (dalam dunia perekonomian) mereka menjajakkan konsepsi 'pasar bebas' yang artinya pemerintah tidak boleh ikut campur mengatur kebebasan individu yang diagungkan oleh Barat. Konsep ini tidak jauh beda dengan hukum rimba, siapa kuat dia menang, siapa lemah akan tersingkirkan.

Dalam kehidupan sosial muncul paham *hedonisme* dan *permisivisme*, dalam pendidikan muncul paham *materialisme*, dalam keagamaan berkembang *sinkretisme*, dalam dunia politik hiduplah sikap *oportunisme*, dan seterusnya. Inilah bencana kapitalisme (lihat uraian kerusakan kapitalisme pada Al-Jawi, 2001). Turunan dari prinsip individualisme ini berkembang

¹¹ Suwardjono. *Teori Akuntansi ...*, hlm. 99.

ke dalam wujud *entity theory*.¹² Teori ini tidak hanya dimaknai sebagai pemisahan kekayaan pribadi dengan perusahaan, namun bermakna pula entitas bisnis ibarat individu yang harus dilayani dan dihormati hak-haknya oleh negara.

Narsa (2007) memberikan kritik terhadap bangunan pokok yang melandasi akuntansi saat ini, yaitu tujuan utama pelaporan keuangan hanyalah kreditur dan investor, serta konsepsi pemertahanan modal yang berpijak pada kapitalisme. Dari sinilah keberadaan entitas bisnis melebihi naungan negara karena dia bisa bersifat trans-nasional dengan pengelolaan kekayaan yang tak terbatas. Dalam kapitalisme, fungsi negara dikebiri dengan hanya menjadi wasit (*regulator*) dalam kehidupan masyarakat. Negara tidak boleh masuk dalam ranah privat (agama, ekonomi, pendidikan) sehingga fungsi distributor kekayaan, fungsi keamanan dan yang lain menjadi mandul. Pangkalnya adalah sekulerisme (*fashlu al-dini 'an al-hayat*) -pemisahan urusan dunia dengan agama- sehingga seluruh aturan dalam kehidupan diatur oleh manusia sendiri, tidak ada kaitannya dengan agama

Konsep di atas tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Islam memandang bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dengan sifat buruk atasnya (serakah, kikir, sombong, dll) sehingga diperlukan petunjuk dari luar untuk meredam tabiat buruk ini. Oleh karenanya, Islam datang dengan syari'at berisi aturan yang datang dari Pencipta (*Al-Khaliq*) manusia, yaitu Allah swt., untuk menundukkan subyektifitas dan egoisme. Karena standar hidup (*maqayis*) manusia harus berdasarkan syari'at Islam bukan pada individu, termasuk dalam penentuan baik dan buruk perbuatan. An-Nabhani¹³ mengatakan bahwa predikat baik (*khair*) dalam penilaian seorang muslim adalah

¹² Hendry Y. Setiabudi dan Iwan Triyuwono. *Akuntansi Ekuitas Dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme dan Islam* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002), hlm. 23.

¹³ Taqiyuddin An-Nabhani, *Ma'fahim Hizbut Tahrir* (terjemahan) (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2001), hlm. 44.

sesuatu yang diridhai Allah swt. sedangkan buruk (*syarr*) adalah sesuatu yang dimurkai Allah swt. Di sinilah seharusnya tujuan negara diletakkan yaitu berdasarkan syari'at Islam.

Bila tujuan akuntansi didasarkan atas tujuan negara, sedang tujuan negara berdasar aturan masing-masing negara atas dasar keragaman berpikir manusianya maka tak pelak sistem pelaporan keuangan masing-masing negara selamanya juga akan berbeda. Tak heran bila upaya harmonisasi akuntansi berjalan lambat, namun bila didasarkan atas syari'at Islam yang berlaku untuk setiap tempat dan sepanjang waktu, kendala ini tidak akan ditemui.

Muhammad menyatakan bahwa nilai-nilai, sistem dan filsafat ilmu akan turut menentukan model ilmu yang berkembang di suatu negara. Apabila suatu negara menganut sistem ekonomi kapitalisme, maka sistem akuntansi yang berkembang adalah sistem akuntansi kapitalis. Demikian pula, apabila suatu negara mengikuti sistem ekonomi Islam maka sistem akuntansi yang berkembang adalah sistem akuntansi Islam (*syari'ah*). Muhammad¹⁴ memperkuat pendapatnya dengan mengutip pendapat Tricker yang menyatakan bahwa: “(bentuk) akuntansi sebetulnya tergantung pada ideologi dan moral masyarakat. Akuntansi tidak bebas nilai. Akuntansi adalah anak dari budaya (masyarakat). Pandangan ini jelas membawa implikasi terhadap studi akuntansi kontemporer”.

Penulis sepakat dengan pendapat Muhammad di atas yang memposisikan akuntansi sejalan dengan sistem ekonomi yang dianut oleh suatu masyarakat. Hanya saja posisi tersebut lebih tepatnya sebagai teknologi yang mempermudah penggunaannya untuk mencapai tujuan dan ideologi (keyakinan) yang dipegangnya. Pada titik ini, Muhammad berkesimpulan bahwa nilai-nilai yang ada pada akuntansi merupakan pancaran dari nilai *inheren* (*value-laden*) yang diemban oleh akuntansi. Padahal sebenarnya nilai tersebut berasal dari luar (oleh pemakainya) sehingga yang diubah, dalam kaitannya dengan permasalahan

¹⁴Muhammad, *Pengantar Akuntansi ...*, hlm. 10.

akuntansi konvensional, adalah sistem kehidupan (ideologi) yang dianut oleh negara tersebut, bukan akuntansinya secara langsung. Penarikan kesimpulan inilah yang penulis tidak sepakati.

Triyuwono dan As'udi menyebutkan bahwa tujuan dalam akuntansi syari'ah berdasarkan pada tujuan ekonomi Islam yaitu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat.¹⁵ Sedangkan Syahatah menyebutkan tujuan dari akuntansi dalam Islam adalah¹⁶:

- a. *Hifz'ul Amwal* (memelihara uang).
- b. Menjadi bukti pencatatan (kitabah) tatkala ada perselisihan.
- c. Dapat membantu mengambil keputusan.
- d. Menentukan hasil-hasil usaha yang akan dizakatkan.
- e. Menentukan dan menghitung hak-hak kawan yang berserikat.
- f. Menentukan imbalan, balasan dan sanksi.

Tujuan di atas dapat dibenarkan syari'at dengan catatan tidak bertentangan dengan syara'. Secara luas tujuan diterapkannya syari'at Islam (*Maqashid asy Syar'iyah*) menurut Kurnia (2008) adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara Keturunan (*al-Muhafaz'hab 'ala an-Nasl*)
- b. Memelihara Akal (*al-Muhafaz'hab 'ala al-'Aqlu*)
- c. Memelihara Kehormatan (*al-Muhafaz'hab 'ala al-Karamah*)
- d. Memelihara Jiwa Manusia (*al-Muhafaz'hab 'ala an-Nafsi*)
- e. Memelihara Harta (*al-Muhafaz'hab 'ala al-Mal*)
- f. Memelihara Agama (*al-Muhafaz'hab 'ala Ad-din*)
- g. Memelihara Keamanan (*al-muhafaz'hab 'ala al-amm*)
- h. Memelihara Negara (*al-Muhafaz'hab 'ala ad-Dawlah*)

Kerangka konseptual lebih lanjut digambarkan oleh Kieso

¹⁵Iwan Triyuwono dan Mohamad As'udi. *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Zakat dalam Konteks Metafora Zakat* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 27.

¹⁶Husein Syahatah. *Usul al Fikri al Mubasabah Islam terj.*, (Jakarta: Media Akbar Sarana, 2001), hlm. 44-48.

et.al. Penjabaran singkat tentang model yang disampaikan Kieso adalah sebagai berikut.¹⁷

Tingkat pertama tujuan pelaporan keuangan yaitu: (1) berguna untuk membuat keputusan investasi dan kredit bagi yang mengerti penuh aktivitas bisnis dan ekonomi, (2) membantu kreditor dan investor saat ini dan potensial untuk mengetahui jumlah waktu dan ketidaktidakpastian *cash flow* masa depan, (3) mengetahui hak dan perubahan sumber daya ekonomi.

Tingkat kedua merupakan penghubung antara tingkat pertama dengan tingkat ketiga. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi terbagi dua, yaitu bermanfaat dalam pengambilan keputusan, dan keterpahaman. Karakter yang pertama terdiri dari relevansi dan reliabilitas. Sedang karakter yang kedua terdiri atas keterbandingan dan konsistensi. Elemen dari laporan keuangan terdiri atas: aset, kewajiban, modal, investasi pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, keuntungan serta kerugian.

Tingkat ketiga merupakan konsep pengakuan dan pengukuran. Asumsi dasar meliputi: asumsi *economic entity*, *going concern*, *monetary unit* dan *periodicity*. Prinsip Dasar Akuntansi meliputi: Prinsip Kos Historis, Pengakuan pendapatan, *matching* dan pengungkapan penuh. Sedang hambatan (kendala) yang dihadapi yaitu: keterkaitan manfaat dan kerugian, materialitas, lingkungan bisnis dan konservatisme.

Keberatan yang sering diajukan oleh penggagas akuntansi syari'ah pada kerangka konseptual di atas adalah terkait asumsi serta tujuan pelaporan keuangan karena lahir dari pemahaman/*aqidah* tertentu dan tidak bersifat ilmiah. Sedang elemen yang lain tidak banyak 'digugat' karena pada dasarnya bersifat teknis dan menyesuaikan dengan kebutuhan akan sifat atau karakter pelaporan. Kerangka konseptual di atas sejalan dengan karakteristik korporasi yang dibangun oleh sistem kapitalisme. Kieso, *et.al* mengungkapkan beberapa karakter (prinsip) yang

¹⁷ Weygandt Kieso and Kimmel. *Intermediate Accounting* (USA: John Wiley & Sons, Inc, 2004), hlm. 30-45.

harus dipenuhi oleh perusahaan yang berbentuk korporasi, yaitu:¹⁸

a. Separate of Legal Existence.

Perusahaan merupakan entitas tersendiri yang terpisah dari pemiliknya secara legal (hukum) sehingga memungkinkannya bertindak atas nama perusahaan itu sendiri bukan atas nama pemilik. Jadi, hubungan antara pemilik dan kesatuan usaha dipandang sebagai hubungan bisnis (hak dan kewajiban atau utang dan piutang). Pemisahan kedudukan kesatuan usaha dan pemilik berarti bahwa fungsi manajemen terpisah dengan fungsi investasi. Kesatuan usaha menjadi sudut pandang akuntansi, yaitu akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik. Dengan kata lain, kesatuan usaha menjadi kesatuan pelapor yang bertanggungjawab kepada pemilik.

b. Limited Liability of Stockholders.

Pemilik saham (*stockholders*) memiliki akses (hak dan kewajiban) yang terbatas terhadap perusahaan sebesar jumlah saham yang dimilikinya. Karena perusahaan merupakan entitas yang terpisah dari pemilik, maka hubungan antarkeduanya tidak bersifat langsung (*intervensif*) namun melalui mekanisme yang cukup rumit. Begitu pula hubungannya dengan kreditor. Kreditor tidak memiliki klaim hukum untuk menuntut pemilik saham melebihi kontribusi modal yang mereka tanamkan dalam perusahaan tersebut. Artinya, jika perusahaan mengalami kebangkrutan maka kreditor tidak dibolehkan untuk menuntut aset pribadi pemilik modal agar melunasi hutang perusahaan yang tidak terbayarkan oleh kekayaan perusahaan.

c. Transferable Ownership Rights.

Pemilik saham (*stockholders*) memiliki keleluasaan untuk memindahtangankan kepemilikan mereka atas perusahaan

¹⁸ Weygandt Kieso and Kimmel. *Accounting Principle* (USA: John Wiley & Sons, Inc, 2002), hlm. 561.

seberapapun besarnya dengan cara menjualnya. Pemilik perusahaan adalah mereka yang memegang saham tersebut dengan hak atas perusahaan berdasarkan prosentase kepemilikannya. Atas dasar *economic entity* (pemisahan hukum atas pemilik dan perusahaan), maka sejatinya perpindahan kepemilikan tidak mempengaruhi operasional perusahaan karena perusahaan mempunyai aturan sendiri yang telah dirumuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang melibatkan seluruh pemilik saham.

d. Ability to Acquire Capital.

Perusahaan mempunyai kemampuan dan kebolehan untuk mendapatkan tambahan modal dengan menerbitkan saham baru. Penerbitan saham seolah merupakan aktivitas tersendiri yang terpisah dari kontrak mereka dengan pemegang saham awal. Penerbitan saham ini secara kumulatif akan mengubah komposisi kepemilikan perusahaan. Alasan utama penerbitan saham baru adalah untuk mendapatkan tambahan suntikan modal guna ekspansi (perluasan) operasi perusahaan.

e. Continuous Life.

Prinsip ini menganggap bahwa sebuah perusahaan didirikan bukan untuk dibubarkan. Artinya, mereka berasumsi bahwa usia perusahaan tidak akan berakhir (kecuali bila dinyatakan bangkrut), sehingga berdiri / bubarnya perusahaan tidak dipengaruhi faktor diluar entitas, misalkan kematian atau kebangkrutan pemegang saham, pekerja atau pihak manajemen.

f. Corporation Management.

Secara hukum pihak yang memiliki perusahaan adalah para pemegang saham, namun yang berhak mengelola perusahaan adalah pihak manajemen. Intervensi pemilik terhadap perusahaan dilakukan secara tidak langsung melalui penunjukan dewan direksi.

g. Governmental Regulations.

Perusahaan merupakan subyek regulasi (aturan) dari pemerintah sehingga mereka secara entitas harus mematuhi aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, misalkan dalam aturan penerbitan saham, pembagian keuntungan (*dividen*) dan pengelolaan perusahaan lain (*corporate action*).

b. Additional Taxes.

Perusahaan berbentuk korporat merupakan obyek yang harus membayar pajak atas penghasilan yang mereka dapatkan.

Karakter (prinsip) korporasi di atas sejatinya bermula dari konsep *economic entity* sebagai asas utamanya, sedang prinsip yang lain merupakan penjabaran (*derivasi*) dari karakter utama tersebut. Disinilah letak permasalahannya. Kebatilan perseroan terbatas dalam ekonomi konvensional terletak pada tanggung jawab yang terbatas ini. Jika perusahaan rugi atau bangkrut, para kreditur dan pemilik hak lainnya tidak dapat menuntut pada persero perusahaan sedikitpun, berapapun kewajiban perusahaan terhadap mereka. Mereka hanya bisa menuntut atas haknya sebatas aset perusahaan yang tersisa. Dengan demikian, sistem perseroan ini merupakan suatu perlindungan sistematis bagi para pemilik modal dan pengelola perusahaan.

Sistem perseroan dengan tanggung jawab terbatas bertentangan dengan hukum *syara'* yang menuntut ditunaikannya seluruh kewajiban mereka terhadap pihak lain di dunia ini, sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah:

“Siapa saja yang mengambil harta orang dan bermaksud untuk melunasinya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Dan siapa saja yang mengambil harta orang dan bermaksud merusaknya, maka Allah akan merusak orang itu.”

Juga dalam hadits yang lain: *“Sungguh hak-hak itu pasti akan ditunaikan kepada para pemiliknya pada hari kiamat nanti, hingga seekor*

domba betina tak bertanduk akan mendapat kesempatan membalas karena pernah ditanduk oleh domba betina bertanduk.” (HR. Imam Ahmad dari Abu Hurairah).

“Perbuatan orang kaya menunda-nunda pembayaran utangnya adalah suatu kezhaliman.” (HR. Imam Bukhari dari Abu Hurairah).

“...sebaik-baik orang di antara kalian, adalah yang paling baik dalam penunaian hak (pembayaran utang, dan lain-lain).” (HR. Imam Bukhari).

Artinya, perusahaan dalam Islam merupakan *syakhsiyah hukmiyah*, yaitu entitas yang juga terikat hukum syara'. Pemiliknya berkewajiban mengelola perusahaan tersebut dan bertanggung-jawab atas semua aktivitas yang telah dilakukan perusahaan. Dari sini, pemilik tetap terkena kewajiban melunasi utang perusahaan meski menggunakan uang pribadi. Namun Islam juga tetap memberikan perlindungan terhadap pemilik dengan tidak dibolehkannya menyita aset pribadi yang mengganggu kehidupan wajar di masyarakat. Para fuqaha memberikan uraian tersebut dalam bab *taflis* (kebangkrutan). *Taflis* menurut *syara'* dapat diungkapkan dalam dua pengertian, yaitu:

- a. *Taflis* adalah suatu kondisi utang yang pembayarannya dapat menghabiskan harta orang yang berutang. Akan tetapi, hartanya itu tidak dapat membayar seluruh utang-utangnya
- b. *Taflis* adalah suatu kondisi seseorang yang tidak memiliki harta sama sekali

Beberapa *atsar* yang disampaikan oleh Rasulullah tentang *taflis* (kebangkrutan) diantaranya misalkan: “Malik ibnu Anas telah menceritakan kepada kami, dari Yahya ibnu Sa'id, dari Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Amr ibnu Hazm, dari Umar ibnu Abdul Aziz, dari Abu Bakar ibnu Abdur Rahman ibnul Harits ibnu Hisyam, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

“Barang siapa yang mengalami kebangkrutan, lalu si pemilik barang menjumpai hartanya masih utuh ada padanya, maka ia lebih berhak

terhadap harta itu.”

Ibnu Abu Fudaik telah menceritakan kepadanya, dari Ibnu Abu Dzib yang mengatakan bahwa Abdul Mu'tamir ibnu Amr ibnu Rafi' telah bercerita kepadanya, dari Abu Khaldah Az Zuraqi – mantan *Qadhi* Madinah – yang mengatakan:

Kami datang kepada Abu Hurairah mengadukan perihal seorang teman kami yang mengalami kebangkrutan, maka ia berkata, 'Ini semua kasusnya dengan apa yang pernah diputuskan oleh Rasulullah SAW, yaitu 'Barang siapa meninggal dunia atau mengalami kebangkrutan, maka pemilik barang lebih berhak menyita barangnya jika ia menemukannya masih dalam keadaan utuh'

Menyadari akan ketidakberesan konsep *economic entity*, Harahap mencoba menguraikan pandang alternatif tentang hubungan perusahaan sebagai satu entitas dengan pemilik sebagai entitas yang lain, yaitu:

- a. *The Proprietary Theory*. Konsep ini memandang entitas sebagai agen, perwakilan, *wakalah* atau penugasan dari pengusaha atau pemilik. Pusat perhatian laporan keuangan konsep ini adalah pemilik (*proprietor*).
- b. *The Entity Theory*. Entitas dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menanamkan modal ke dalam perusahaan. Pusat perhatian informasi keuangan adalah unit usaha yang dijalankan, bukan pemilik.
- c. *The Fund Theory*. Konsep ini memandang unit usaha merupakan sumber ekonomi dan kewajiban yang ditetapkan sebagai pembatasan terhadap penggunaan aset. Pusat perhatian pada konsep ini adalah sekelompok aset dan kewajiban yang harus ditunaikan dalam aturan dan penggunaannya.
- d. *The Enterprise Theory*. Konsep yang memandang tanggungjawab perusahaan haruslah kepada publik yang lebih luas, bukan terbatas pada entitas.
- e. *Residual Equity Theory*. Pusat perhatian pada konsep ini adalah pemegang saham biasa.

- f. *Commander Theory*. Pusat perhatian pada konsep ini adalah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk melakukan kontrol ekonomi.
- g. *The Investor Theory*.
- h. *Ibadah Theory*

Harahap mencantumkan *ibadah theory* sebagai usulan terakhir yang ditawarkan Islam terhadap kerumitan ini. Namun rumusan konsep tersebut rupanya belum jelas dan spesifik. Berdasar eksplorasi *nash syar'i* yang diungkap di atas telah jelas kerusakan pandangan kapitalisme tentang konsep *economic entity* sehingga konsep ini seharusnya dihilangkan dari asumsi akuntansi syari'ah. Namun hal ini tidak berarti pengelolaan keuangan dalam akuntansi syari'ah harus dicampurkan antara kekayaan pemilik dan kekayaan perusahaan. Perbedaan utamanya hanyalah dalam aspek kewajiban hukum yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan sebagaimana ketentuan *syirkah* yang dipaparkan oleh an-Nabhani.¹⁹

Demikianlah penilaian *syara'* atas perekayasaan kerangka konseptual akuntansi syari'ah yang digunakan selama ini. Dengan tinjauan *syar'i* tersebut diharapkan para akuntan dan penggiat akuntansi syari'ah dapat berdiskusi secara ilmiah dan komunikatif untuk memperbaiki perekayasaan yang keliru tersebut agar pada tahapan selanjutnya dapat dibangun kerangka konseptual akuntansi yang Islami.

Tak berhenti sampai di sini, mendatang masih banyak agenda ilmiah yang harus dilengkapi oleh para penggiat akuntansi syari'ah dalam memberikan penilaian *syar'i* atas konsepsi akuntansi yang ada. Bila studi ini fokus pada perekayasaan kerangka konseptual dalam pandangan Islam, maka tahapan berikutnya masih terdapat asumsi dasar dan prinsip akuntansi yang didalamnya juga syarat dengan *judgment* nilai oleh subyek

¹⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (terjemahan *An Nizham al Iqtishadi fi al Islam*) (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm,153-155.

perekayasannya. Asumsi dasar meliputi asumsi *economic entity*, *going concern*, *monetary unit* dan *periodicity*. Prinsip Dasar Akuntansi meliputi prinsip kos historis, pengakuan pendapatan, *matching* dan pengungkapan penuh. Sedang hambatan (kendala) yang dihadapi yaitu keterkaitan manfaat dan kerugian, materialitas, lingkungan bisnis dan konservatisme.

C. Simpulan

Perkembangan upaya konstruksi akuntansi syari'ah selama ini masih terkendala dikotomi dua pendekatan arus utama pemikiran (*school of thought*), yaitu filosofis dan praktis. Selain itu kedua pendekatan tersebut cenderung saling mengklaim dan mendekonstruksi selainnya. Kondisi tersebut tentu berimbas tidak hanya aspek praktis berjalan, tetapi juga prospektif. Dalam aspek praktis berjalan, terjadi stagnasi perkembangan akuntansi syari'ah, yakni isu akuntansi syari'ah hanya difahami oleh sebagian kecil kalangan, utamanya penggagas dan akademisi. Masyarakat akuntansi secara umum tidak terusik atau terpacu mempelajari dan memahami tawaran konsepsi yang diajukan karena pembahasan yang melangit dan tidak aplikatif.

Dalam tataran prospektif, perkembangan akuntansi syari'ah tentu saja sulit untuk berkembang, apalagi berharap dapat menggantikan bangunan akuntansi konvensional yang selama ini berjalan dan diterima secara luas oleh masyarakat. Ditambah lagi dikotomi pendekatan yang ada terlihat sangat kentara, tampak masing-masing menapaki jalur yang berbeda meski tujuan utamanya sama.

Akuntansi syari'ah harusnya dikembangkan dari telaah kritis proses perekayasaan kerangka konseptual akuntansi yang selama ini ada karena perekayasaan tersebut merupakan jembatan antara dunia praktis dan ranah teoritis. Keterhubungan (*interconnection*) dan sinergi tersebut penting agar tercipta harmonisasi dan keberlanjutan dari ranah penelitian (riset) oleh akademisi hingga kebermanfaatannya di lapangan oleh praktisi.

Perekayasaan kerangka konseptual akuntansi konvensional

dibangun atas dasar prinsip individualisme dan berimbang pada upaya pencapaian tujuan ekonomi dan sosial suatu negara atas prinsip ini. Selanjutnya tujuan pelaporan keuangan sebagai landasan mengembangkan kerangka konseptual pun bersandar pada prinsip ini. Dalam Islam tujuan diterapkannya syari'ah dan juga tujuan ekonomi sosial suatu negara bersandar pada *Maqashid asy Syar'iyah* agar tercipta *rahmat lil 'alamin*. Derivasi dari prinsip ini adalah pembentukan asumsi dan tujuan pelaporan keuangan yang didasarkan pada konsepsi *economic entity*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jawi, M Siddiq, “Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Paska Keruntuhan Kapitalisme”. Makalah disampaikan pada *Seminar Akademik HIMA D3 FIS UNY*, Hall Olahraga UNY Kampus Wates, 27 Oktober 2001.
- Hendriksen, Eldon S, *Teori Akuntansi terj.*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Kieso, Weygandt and Kimmel, *Accounting Principle*. USA: John Wiley & Sons, Inc., 2002.
- , *Intermediate Accounting*, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2004.
- Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005.
- , *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Mulawarman, Aji Dedi, *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta, 2006.
- , “Laporan Arus Kas Syari’ah Berbasis Ma’isyah: Diangkat dari Habitus Bisnis Muslim Indonesia”, Makalah disampaikan dalam *Simposium Nasional Akuntansi X*, Universitas Hassanudin 23-25 Juli 2007.
- , “Menggagas Neraca Syari’ah Berbasis Maal: Kontekstualisasi “Kekayaan Altruistik Islami”, The 1th Accounting Conference: Bridging The Gap Between Theory, Research and Practise, Universitas Indonesia 7-9 Nopember 2007.
- , “Menggagas laporan Keuangan Syari’ah Berbasis Trilogi Ma’isyah-Rizq-Maal”, Makalah disampaikan dalam *Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam*, Universitas Padjadjaran 14-15 Nopember 2007.

- , “Eksistensi Laporan Nilai Tambah Syari’ah Berbasis Rezeki”. Prosiding *Simposium Nasional Akuntansi XI*, Universitas Tanjung Pura 23-24 Juli 2008.
- Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, terj. *An Nizham al Iqtishadi fi al Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Setiabudi, Hendry Y. dan Iwan Triyuwono, *Akuntansi Ekuitas dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme dan Islam*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002.
- Sudiby, Bambang, “Rekayasa Akuntansi dan Permasalahannya di Indonesia”. Makalah disampaikan dalam acara *Peringatan Ulang tahun Ikatan Akuntansi Indonesia ke 29*, Jakarta, 22 Desember 1986.
- Swardjono, *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Yogyakarta: BPF, 2005.
- Syahatah, Husein, *Usul al Fikri al Mubasabah Islam*, terj., Jakarta: Media Akbar Sarana, 2001.
- Triyono, “Rekayasa Akuntansi Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. I, No. 1, April 2002.
- , “Akuntansi Dalam Perspektif Historis”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 2 No. 2, September 2003.
- Triyuwono, Iwan dan As’udi, Mohamad, *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Zakat dalam Konteks Metafora Zakat*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Triyuwono, Iwan, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.